

**Islam Nusantara: Antara Argumen  
Politis, Spiritual, dan Epistemologis**  
Arif Budiman

**Kelahiran dan Perkembangan  
Lesbumi: Suatu Studi Historis**  
Johan Wahyudi

**Pelaksanaan Ibadah Haji Masa  
Hindia Belanda: Tinjauan Kritis  
Terhadap Pemikiran C. Snouck  
Hugronje**  
Lesi Maryani dan Andriyansyah

**Strategi Keamanan Maritim  
Singapura dan Dampaknya Bagi  
Indonesia**  
Pradito Komojoyo

**Implementation Gap Dalam  
Kebijakan Pemberian Beasiswa  
Siswa Unggul Papua di Luar Negeri**  
Muhammad Rizal Otto

**Efektivitas Strategi Deradikalisasi  
Pada Narapidana Terorisme di  
Rutan Cikeas**  
Dini Probawati

ISSN 2621-4938  
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF  
**PeGON**  
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

---

Volume 10 . issue 2 . 2023

---

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF  
**PeGON**  
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION  
Vol. 10 - Issue 2 - 2023

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, anthropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

**Editorial Team**

**Editor-In-Chief**

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

**Managing Editor**

Mohamad Shofin Sugito

**Peer Reviewer**

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman  
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.  
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)  
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)  
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)  
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)  
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)  
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

**Editors**

Johan Wahyudi  
Mohammad Taufiq  
Ahmad Ali

**Asistant Editors**

Muhammad Anwar  
Zainal Abidin  
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

**Published by:**

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)  
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten  
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



## **TABLE OF CONTENTS**

The International Journal of **PEGON**

Islam Nusantara Civilization

Vol. 10 - Issue 2 - 2023

<b>Table of Contents</b>	iii
<b>ISLAM NUSANTARA: ANTARA ARGUMEN POLITIS, SPIRITUAL, DAN EPISTIMOLOGIS</b> Arif Budiman	1
<b>KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LESBUMI: SUATU STUDI HISTORIS</b> Johan Wahyudi	23
<b>PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE</b> Lesi Maryani dan Andriyansyah	43
<b>STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA</b> Pradito Komojoyo	59
<b>IMPLEMENTATION GAP DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA DI LUAR NEGERI</b> Muhammad Rizal Otto	77
<b>EFEKTIVITAS STRATEGI DERADIKALISASI PADA NARAPIDANA TERORISME DI RUTAN CIKEAS</b> Dini Probowati	99

# STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

---

**Pradito Komojoyo**

Compass Indonesiatama Jakarta

radit.dit88@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.84>

## أبستراك

كیامانان ناسیاونال ماسیه مینجادی بالکیان اوتاما بالکپی سیتیانف نیلکپارا دی دونیا، تیداک تیزکیچوآلی سیغافورا دالام میووجودکان توجوان نیلکپارا ای. سیغافورا سیبالکپی ای سالاہ ساتو نیلکپارا کیفولوان دی آسیا تیغکپارا میمانداغ ہوا تیغکات کیامانان ماریتیم مینجادی کونچی دالام مینجاکپا ستابیلیتاس کیامانان ناسیاونالی ای. نامون، اوقایا-اوقایا یاغ دیلاکوکان اولیہ سیغافورا دالام میمفیرتاهانکان فوسیسپی کیامانان ماریتیم یا بیزلکپیسیکان دیغان نیلکپارا-نیلکپارا دی سیکیتازی، تیزماسوک ایندونیسیا. فوسیسپی ایی سیلانجوٹی اداقت میروکپیکان ایندونیسیا. فنیلینیان ایی میروفاکان فنیلینیان دیغان میغکوناکان میتودی انالیسیس دیسکریفٹیف کوآلیتاتیف. فاذا تیلیسان ایی میلہات بالکایمانا اوقایا سیغافورا یاغ میمفیرکوآت کیماڈفوان ماریتیم یا سیبالکپی فینجاباران کیامانان ناسیاونالی ای اداقت میمفیرغاروہی ویلایاہ کیداولاتان ایندونیسیا.

کاتا کونچی: کیامانان، سیغافورا، کیداولاتان، ایندونیسیا.

### **Abstrak**

Keamanan Nasional masih menjadi bagian utama bagi setiap negara di dunia, tidak terkecuali Singapura dalam mewujudkan tujuan negaranya. Singapura sebagai salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara memandang bahwa tingkat keamanan maritim menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasionalnya. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh Singapura dalam mempertahankan posisi keamanan maritimnya bergesekan dengan negara-negara disekitarnya, termasuk Indonesia. Posisi ini selanjutnya dapat merugikan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada tulisan ini melihat bagaimana upaya Singapura yang memperkuat kemampuan maritimnya sebagai penjabaran keamanan nasionalnya dapat mempengaruhi wilayah kedaulatan Indonesia.

**Kata Kunci:** *Keamanan, Singapura, Kedaulatan, Indonesia.*

### **Abstract**

National security is still a major part of every country in the world, including Singapore, in realizing its country's goals. Singapore, as an archipelagic country in Southeast Asia, views the level of maritime security as key to maintaining the stability of its national security. However, the efforts made by Singapore to maintain its maritime security position rub against other countries around it, including Indonesia. This position can further harm Indonesia. This research uses the descriptive qualitative analysis method. This paper looks at how Singapore's efforts to strengthen its maritime capabilities as an extension of its national security can affect Indonesia's sovereign territory.

**Keyword:** *Security, Singapore, Sovereignty, Indonesia.*

## A. PENDAHULUAN

Isu keamanan nasional masih menjadi *vocal point* utama bagi setiap negara-negara di dunia dengan dihadapkan oleh konstelasi politik internasional yang begitu dinamis. Bahkan dalam mencermati hal tersebut, setiap negara akan mengambil berbagai kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga keamanan nasionalnya dari bermacam-macam potensi ancaman yang timbul. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman tersebut tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber. Ancaman ini juga memiliki kompleksitas yang berbeda-beda, serta datang baik itu dari dalam maupun luar negeri.

Di dalam pandangan internasional, istilah keamanan akan lebih difokuskan kepada sisi militer, di mana inti utamanya adalah pada perlindungan negara dari berbagai ancaman yang timbul terhadap kepentingan nasional. Namun demikian, dengan berkembangnya zaman, maka gagasan tradisonal mengenai keamanan kemudian menjadi bergeser yang mulai mengacu kepada kelangsungan hidup nasional, perlindungan fisik terhadap suatu wilayah negara dan kekuatan militer dari ancaman eksternal dan serangan yang disebut sebagai *raison d'etre* dari negara-negara berdaulat lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu dimensi ancaman yang timbul dan dapat mempengaruhi keamanan nasional suatu negara, yakni berasal dari laut atau maritim. Kondisi ini sangat tidak terlepas bahwa laut atau maritim telah berkembang menjadi lebih strategis dari era-era sebelumnya. Bahkan sangat besar kemungkinannya bahwa situasi lingkungan strategis di ranah maritim dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan maritim itu sendiri. Keamanan maritim saat ini tidak hanya menjadi fokus bagi negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, RRT, Australia, India maupun Jepang, namun juga bagi negara-negara kecil, seperti Singapura.

Perumusan kebijakan keamanan maritim bagi Singapura menjadi sangat penting. Hal ini sangat tidak terlepas bahwa kondisi

---

<sup>1</sup> Amaritasari, Indah. 2015. Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 1 No.2 hal 153-173

geografis negara tersebut mengharuskan memiliki kekuatan keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Secara geografis, Singapura berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang terdiri dari berbagai pulau dan menjadi negara terkecil di kawasan. Singapura diapit oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia di selatan Semenanjung Malaka. Singapura terletak 137 kilometer sebelah utara garis khatulistiwa. Letak geografis Singapura ini menjadikan negara tersebut menjadi sangat strategis, karena berada di jalur pelayaran internasional.

Mengetahui begitu strategisnya posisi Singapura maupun sebagai negara terkecil di kawasan, maka bagi Pemerintah Singapura, bidang pertahanan dan keamanan menjadi masalah serius yang harus ditangani bahkan sejak awal kemerdekaan. Dengan berbagai cara apa pun, Pemerintah Singapura tentunya harus membangun sistem pertahanan dan keamanannya, karena menyadari bahwa negaranya tidak akan mampu mempertahankan diri dalam melawan setiap agresi yang timbul dari luar negeri. Sistem pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan maritim ini menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi kedaulatan, serta keutuhan wilayah negaranya.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan keamanan nasionalnya, Singapura berusaha membangun kapabilitas militer konvensional dengan memadukan keunggulan pada teknologi, ukuran dan kemampuan dalam melakukan operasi serangan dengan memiliki kualitas angkatan bersenjata yang baik. Peningkatan dan pembangunan kekuatan militer Singapura ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan berdasarkan *Global Fire Power* pada tahun 2020, kekuatan militer

---

<sup>2</sup> Harun Umar dan Melati Nasional Rambu Bangi. 2021. Kebijakan Singapura Mempertahankan Kerjasama dengan Israel dalam Bidang Pertahanan Keamanan. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0L-RoJH4AhXHTmwGHARRA90QFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.unas.ac.id%2Ffilmu-budaya%2Farticle%2Fdownload%2F38%2F27&usg=AOvVaw01YNrocojwCIIAINCTCpzB>

Singapura berhasil menduduki peringkat 51 dunia di atas Belarusia dan Hongaria.<sup>3</sup>

Selain meningkatkan kemampuan kapasitas kekuatan militer dari sisi internal, Singapura juga kerap melakukan sejumlah kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain, seperti Israel, India, RRT, Inggris, Australia hingga Indonesia melalui skema Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)*. Melalui kerja sama-kerja sama tertentu, membuat Singapura mendapatkan berbagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan kekuatan militernya.

Selain itu, menyadari terbatasnya luas daratan negaranya, Singapura juga mengambil kebijakan dalam melakukan reklamasi pantainya. Hal ini tidak hanya semata untuk sebagai antisipasi perkembangan penduduk, minimnya luas wilayah daratan, pertimbangan ekonomi dan bisnis, namun juga diperuntukkan untuk memperluas pangkalan-pangkalan militer, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap strategis dan vital dari potensi ancaman yang berasal dari luar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: Apa kebijakan keamanan nasional dan keamanan maritim Singapura dan dampaknya bagi Indonesia?

## **B. KERANGKA TEORITIS**

### **1. Keamanan Nasional**

Dalam kerangka hukum internasional, konsep keamanan nasional diserahkan kepada masing-masing negara, karena memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep itu sendiri. Sebab, konsep keamanan nasional terjadi diakibatkan oleh ada perubahan dan sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik yang terjadi di dunia. Di dalam pandangan tradisional, istilah keamanan sangat berkait erat dengan militer, di mana memiliki fokus utama terhadap perlindungan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ade Pamungkas. 14 Juli 2020. Kekuatan Militer Singapura 2022, dari Pasukan hingga Senjata. <https://tirto.id/kekuatan-militer-singapura-2020-dari-pasukan-hingga-senjata-fQCE>

negara dari berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara.<sup>4</sup> Selain itu, istilah keamanan dianggap sebagai sebuah keadaan di mana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam Walter-Lippmann, keamanan didefinisikan sebagai suatu keadaan aman bagi suatu bangsa dan tidak mendapatkan paksaan untuk mengorbankan nilai-nilai internal yang dianggap vital. Namun demikian, seiring dengan perubahan zaman, konsep keamanan nasional ini juga memiliki definisi yang lebih luas dari sebelumnya.

Menurut Berkowitz (1965), konsep keamanan nasional merujuk kepada kemampuan suatu bangsa atau negara untuk melindungi nilai-nilai domestiknya dari berbagai ancaman pihak asing. Namun, konsep ini lebih banyak berkembang di Amerika Serikat (AS) setelah terjadinya Perang Dunia II. Selanjutnya, Buzan (1991) membagi keamanan nasional menjadi 3 landasan, yakni landasan ideasional yang mencakup berbagai hal mengenai gagasan tentang apa itu wawasan kebangsaan, landasan institusional yang lebih berfokus terhadap mekanisme kenegaraan dan landasan fisik yang meliputi penduduk, wilayah dan juga sumber-sumber daya yang terletak di dalam lingkup teritorialnya.

Sementara itu, keamanan nasional menurut Thomas dan Mathews yang dikutip oleh Kusnanto Anggoro, memiliki dimensi yang jauh lebih luas tidak hanya berkaitan dengan *nexus military-external*, namun juga merujuk kepada eksistensi suatu negara, di mana termasuk di dalamnya adalah upaya untuk memastikan keamanan internal melalui berbagai dimensi, seperti bina-bangsa, kesediaan pangan, kesehatan, uang, ekonomi, perdagangan hingga pengembangan senjata nuklir. Konsep keamanan nasional berdasarkan Thomas dan Mathews ini mulai mengakui adanya ancaman non militer, tanpa meninggalkan konsep tradisional. Pemikiran ini selanjutnya berkembang yang memunculkan istilah keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*) dan keamanan ekonomi (*economic security*). Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu entitas

---

<sup>4</sup> Amaritasari. *Op.Cit.* Hal 153-154

sosial atau bahkan politik juga dapat menghadapi ancaman di berbagai aspek kehidupan suatu negara yang tidak hanya sebatas pada militer saja.

## **2. Keamanan Maritim**

Berkembangnya konsep keamanan sangat dipengaruhi oleh munculnya ancaman-ancaman baru yang dapat memberikan dampak negatif terhadap aspek kehidupan manusia hingga suatu entitas negara. Menurut (Buzan : 1991), keamanan ini tidak hanya sebatas pada konteks keamanan itu sendiri, namun memiliki konteks yang lebih luas. Dalam hal ini, Buzan membagi keamanan menjadi 5 bidang, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Tidak hanya sebatas pada tersebut, ancaman juga timbul dari sisi laut atau maritim. Ancaman di ranah maritim tersebut juga memiliki dimensi yang luas.

Christian Buerger (2014) menyebutkan bahwa keamanan maritim merupakan sebuah proses yang sangat berkaitan erat dengan 1) kondisi yang menciptakan terjadinya keselamatan laut, kekuatan laut dan ketahanan; 2) kepentingan yang menjadi dasar terjadinya ancaman maritim dan 3) peningkatan keamanan maritim. Di sini, Buerger juga menjelaskan, setiap keselamatan laut meliputi aktivitas bernavigasi dan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya maritim yang dapat berjalan dengan aman dan baik, serta tidak mengganggu dan merugikan orang, lingkungan dan merupakan bagian dari keamanan maritime itu sendiri.

Sementara itu, keamanan maritim (Klein : 2011) disebutkan sebagai salah satu kepentingan keamanan dari suatu negara yang dilihat dari aspek kelautan. Keamanan maritim ini dikembangkan dalam kerangka keamanan dari suatu negara, baik itu di tataran pengelolaan potensi-potensi sumber-sumber daya laut yang bermanfaat bagi kelangsungan suatu bangsa, di mana hal ini harus dikembangkan dan dilindungi, sehingga menjadi suatu aset yang harus dipertahankan keberlanjutannya.

### 3. Kedaulatan Negara

Istilah kedaulatan pertama kali dicetuskan oleh Jean Bodin (1530-1596) di dalam buku *six Livres de republique*. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam melakukan berbagai aktivitasnya, suatu negara dengan bebas mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tanpa bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Kedaulatan suatu negara tidak bersifat mutlak atau absolut, tetapi memiliki batasan-batasan tertentu dengan tetap mengedepankan kedaulatan negara lain. Sementara kedaulatan negara adalah sebuah karakteristik negara yang secara politik merdeka dari negara lainnya, baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Kedaulatan negara dalam implementasinya diwujudkan menjadi dua sisi, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal ini sebagai wujud kekuasaan dan kemampuan dari suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, serta dengan menjalin sebuah kerja sama atau melakukan hubungan internasional. Kewenangan dan kemampuan ini diantaranya berperan serta dalam perundingan, penandatanganan baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Winartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah cara untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data-data yang dikumpulkan dari berupa pengamatan-pengamatan terhadap isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Denzin dan Lincoln (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berasal dari sebuah fenomena sosial yang selanjutnya diinterpretasikan menuju standar norma sosial global. Dalam metode penelitian deskriptif di eksplorasi melalui pemecahan masalah dengan mencoba menggambarkan suatu keadaan objek berdasarkan pada

---

<sup>5</sup> Ardhiwisastra, Yudah Bhakti. 1999. Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing. Alumni: Bandung.

peristiwa-peristiwa yang ada, dan selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan.<sup>6</sup>

### **C. KEBIJAKAN KEAMANAN DAN STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA**

Singapura terus membangun kapabilitas militer konvensional yang dipadupadankan dengan keunggulan teknologi, ukuran dan kemampuan dalam melakukan operasi serangan dengan kualitas angkatan bersenjata yang baik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh sejarah, letak geografis dan wilayah secara keseluruhan negara Singapura. Sejak awal kemerdekaan, bahkan hingga saat ini, bidang pertahanan dan keamanan menjadi salah satu prioritas tertinggi dari Pemerintah Singapura. Hal ini salah satunya ditunjukkan dari jumlah anggaran terhadap militer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura. Setiap tahun, anggaran militer Singapura terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 misalnya, anggaran militer Singapura mencapai USD 4,316 miliar. Sementara pada tahun 2001 mencapai USD 4,369, tahun 2002 sebesar USD 4,581 miliar, tahun 2003 sebesar USD 4,741 miliar, tahun 2004 sebesar USD 5,040 miliar dan tahun 2005 mencapai USD 5,570 miliar.<sup>7</sup>

Singapura secara konsisten menginvestasikan sumber daya finansialnya, terutama dalam jumlah yang cukup besar untuk membangun kemampuan pertahanan militernya. Bahkan pengeluaran Singapura di bidang pertahanan dan keamanan menjadi yang kedua terbesar, setelah pembiayaan sosial dan pelayanan masyarakat. Anggaran militer tersebut dipergunakan untuk membeli sejumlah perangkat perang yang modern, termasuk bagi Angkatan Laut Singapura atau *Republic of Singapore Navy* (RSN). RSN merupakan bagian terintegrasi dari Angkatan Bersenjata Singapura yang bertanggung jawab atas pertahanan Singapura terhadap ancaman laut dan perlindungan jalur komunikasi dari dan ke arah laut.

---

<sup>6</sup> Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2017). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication. hal. 5

<sup>7</sup> The Military Balance 2000-2005

Meskipun demikian, sesuai dengan kerangka Strategi Keamanan Maritim Nasional Singapura / *the National Maritime Security Strategy* (NMSS), dalam upaya menjaga kompleksitas operasi keamanan maritim nasional, RSN berkolaborasi dengan Penjaga Pantai Polisi / *Police Coast Guard* (PCG) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA), termasuk dengan badan-badan terkait lainnya. Konsep kerja sama kedua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keamanan maritim, terutama di era tahun 1990 hingga awal tahun 2000 yang lebih menargetkan kasus-kasus bajak laut, penyelundupan, pencurian di ranah laut dan meningkatnya aksi imigran gelap yang akan masuk ke Singapura setelah adanya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998.<sup>8</sup>

RSN sendiri dibentuk pada tahun 1967. RSN telah menjadi garda terdepan dalam menjaga perairan Singapura. RSN selain bertugas untuk menjaga perairan Singapura, juga memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pendekatan terhadap seluruh sektor pemerintahan di Singapura, terutama terkait dalam merencanakan dan mengoordinasikan tanggapan mengenai potensi ancaman.<sup>9</sup> Dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya, RSN pada tahun 2009 membentuk satuan tugas keamanan maritim atau yang disebut sebagai *Maritime Security Task Force* (MSTF). Pembentukan MSTF ini dianggap perlu, setelah Singapura melihat bahwa keamanan maritim di era saat ini tidak hanya bersumber dari ancaman maritim yang bersifat tradisional, namun juga tengah berkembang menjadi non-tradisional. Untuk menjawab tantangan dan ancaman tersebut, MSTF membentuk dua kelompok. Pertama, yaitu *Sea Security Group* (SSG) / Kelompok Keamanan Laut yang memiliki tanggung jawab atas

---

<sup>8</sup> Bowers, I. & Koh, Swee Lean C., *Singapore's Maritime Security Approach. Grey and White Hulls: An International Analysis of the Navy-Coastguard Nexus*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019

<sup>9</sup> Lihat di [https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2017/june/30jun17\\_fs4!/ut/p/z0/fc0xD4IwEAXg3-LA2FxBIblxUCO4oKldTJVDi3goraD\\_3uLk5HR5L1\\_egQQBklSnz8rqhlTt8I5OD9FmniX4GGSbSe7zeJfn68ksW26jKaxA\\_gduQVePh4xBnhqy-LIgbpoKLNk3k\\_X4pbmhw17wxQVDDvXGo\\_XyqKxrMUalUFXBNyPPF49yenxcp3oUJpw-BG0aZKeQd6VvTBNZQNi0CAGDeJX36\\_y-O7j0QeQwYot/](https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2017/june/30jun17_fs4!/ut/p/z0/fc0xD4IwEAXg3-LA2FxBIblxUCO4oKldTJVDi3goraD_3uLk5HR5L1_egQQBklSnz8rqhlTt8I5OD9FmniX4GGSbSe7zeJfn68ksW26jKaxA_gduQVePh4xBnhqy-LIgbpoKLNk3k_X4pbmhw17wxQVDDvXGo_XyqKxrMUalUFXBNyPPF49yenxcp3oUJpw-BG0aZKeQd6VvTBNZQNi0CAGDeJX36_y-O7j0QeQwYot/)

operasi keamanan maritim di perairan sekitar Singapura, termasuk patroli harian, operasi boarding dan pengawalan di Selat Singapura. Kedua adalah *Force Protection Group (FPG)* / Kelompok Perlindungan Angkatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk bertahan melawan ancaman ke arah laut.<sup>10</sup>

Selain ditunjang dengan anggaran yang cukup besar, untuk menguatkan kemampuan setiap sumber daya di bidang pertahanan dan keamanan, Singapura melakukan sejumlah kerja sama dengan berbagai negara, seperti India, RRT dan AS di bidang militer melalui skema *Defence Cooperation Agreement (DCA)*. Kerjasama di bidang pertahanan ini menjadi salah satu kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Singapura untuk meningkatkan kemampuan angkatan militernya, terutama bagi RSN. Kerjasama dalam bidang pertahanan dengan India dilakukan pada bulan Oktober 2003 yang selanjutnya ditingkatkan pada bulan November 2015. Namun jika ditinjau lebih lanjut, kerja sama keduanya telah dimulai sejak tahun 2013, di mana Singapura dan India melakukan operasi pelatihan angkatan laut tahunan yang disebut sebagai *Anti-Submarine Warfare (ASW)*. Selanjutnya pada tahun 1994, kedua negara sepakat untuk melakukan latihan perang anti-kapal selam juga dilakukan dengan beberapa negara lainnya.<sup>11</sup> Tidak hanya sebatas itu, angkatan laut Singapura (RSN) dan angkatan laut India juga kembali melakukan kerja sama melalui operasi "Lion King" hingga tahun 1999 yang selanjutnya berganti nama menjadi *Singapore-India Maritime Bilateral Exercises / SIMBEX*. Dalam latihan tersebut, memungkinkan RSN untuk memperluas aksesnya terhadap fasilitas angkatan laut India dari Port Blair di Pulau Andaman hingga di Cochin.<sup>12</sup>

Tidak hanya dengan India, Singapura juga melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan RRT melalui penandatanganan perjanjian untuk meningkatkan latihan militer bilateral melalui

---

<sup>10</sup> Lihat <https://amti.csis.org/singapores-conceptualization-of-maritime-security/>

<sup>11</sup> Bilveer Singh, *Southeast Asia-India Defence Relations in the Changing Regional Security Landscape*, IDSA Monograph Series No. 4, Mei 2011, New Delhi.

<sup>12</sup> P.S. Suryanarayana, India, Singapore hold 'maritime exercise'.

*Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation* (ADESC) pada 20 Oktober 2019. ADESC ini merupakan lanjutan dari perjanjian serupa yang ditandatangani antara Sekretaris Permanen Pertahanan Chiang Chie Foo dan Wakil Kepala Staf Jenderal PLA Letjen Ma Xiaotian pada tahun 2008. Melalui kerja sama tersebut, RSN dan angkatan laut RRT akan dapat bekerja sama mencakup *port calls*, latihan militer maritim kedua negara dan kunjungan lapangan dari setiap masing-masing pihak.<sup>13</sup> Bagi Singapura, melalui kerja sama tersebut selain dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan RRT, namun juga memberikan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan stabilitas perairan Singapura secara lebih inklusif, terutama dari peningkatan eskalasi RRT-AS di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Selain itu, Singapura juga diketahui secara aktif melakukan kerja sama militer dengan AS. Hal ini salah satunya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) bahwa RSN dan Angkatan Udara Singapura atau RSAF melakukan latihan perang militer dengan Angkatan Laut AS selama *Pacific Griffin Exercise* pada 22 Juni - 7 Juli 2021 di Perairan lepas Guam. Dalam latihan perang tersebut mencakup pelatihan kontra-terorisme maritim dan simulasi operasi naik kapal oleh para penyelam angkatan laut dari masing-masing pihak. Bahkan pada latihan perang tersebut, juga menjadi pertama kali bagi RSN melakukan penembakan torpedo dan rudal anti-udara Aster.<sup>14</sup>

Selain memaksimalkan fungsi dan peran RSN, serta melakukan sejumlah kerja sama pertahanan dan keamanan di bidang maritim melalui skema DCA, Pemerintah Singapura melakukan kebijakan reklamasi pantai sebagai wujud pengembangan kapasitas pangkalan militer negaranya, termasuk di dalamnya untuk RSN. Bagi Singapura, reklamasi pantai merupakan salah satu kebijakan nasional yang

---

<sup>13</sup> M. Nazarudin Latief. 21 Oktober 2019. Singapura dan China tandatangani perjanjian pertahanan <https://www.aa.com.tr/id/regional/singapura-dan-china-tandatangani-perjanjian-pertahanan/1621146#>

<sup>14</sup> Lim Min Zhang. 6 Juli 2021. Singapore, US navies conduct bilateral exercise in waters off Guan. <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-us-navies-conduct-bilateral-exercise-in-waters-off-guan>

ditujukan bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini dipengaruhi bahwa secara geografis, Singapura merupakan salah satu negara kepulauan, namun memiliki garis pantai yang pendek. Keputusan untuk melakukan reklamasi pantainya, sejalan dengan kebijakan pembangunan fisik Singapura berdasarkan dengan *Concept Plan 2001* yang didasari oleh visi negara tersebut dalam 40-50 tahun mendatang. Dalam konsep tersebut, Singapura memprediksi adanya peningkatan kebutuhan wilayah bagi perumahan, industri, rekreasi, infrastruktur, penampungan air, kebutuhan-kebutuhan teknis lainnya bagi operasional Bandara Changi, serta keperluan militer. Keperluan militer menjadi salah satu isu vital dan strategis oleh Singapura. Sebab melalui reklamasi ini, tingkat keamanan dalam negeri menjadi lebih dari sebelumnya, setelah militer Singapura memiliki jangkauan pangkalan yang lebih luas.

Upaya reklamasi yang dilakukan oleh Singapura masih terus berlanjut hingga saat ini. Saat ini, Singapura diketahui tengah terus berupaya melakukan reklamasi di Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca. Letak Pedra Branca yang terletak di titik pertemuan antara Selat Singapura dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) menjadi lokasi strategis bagi Singapura dalam menjaga kedaulatan negara. Keputusan mereklamasi pantai di Pedra Branca saat ini menjadi vital dilakukan oleh Singapura. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa konflik di LTS antara RRT, Malaysia, Filipina dan Vietnam terjadi halaman wilayah Singapura. Sehingga membangun fasilitas keamanan di Pedra Branca saat ini menjadi mutlak untuk segera dilakukan, meskipun Singapura tidak berstatus sebagai *claim state*.

Di satu sisi, keberadaan Pedra Branca menimbulkan konflik antara Singapura dengan Malaysia. Masing-masing negara mengklaim wilayah tersebut sebagai teritorinya. Meskipun sejak 23 Mei 2008 berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pedra Branca diserahkan kepada Singapura dengan alasan efektivitas, namun di sisi Malaysia belum mengakui keputusan tersebut. Sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Internasional, Singapura selanjutnya melakukan reklamasi Pedra Branca sebagai penegasan sekaligus untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim negaranya. Namun langkah tersebut mendapatkan penolakan keras dari Malaysia yang

menilai bahwa Pedra Branca masih menjadi teritorinya berdasarkan historis (todayonline.com : 2021).

#### **D. DAMPAK KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM SINGAPURA TERHADAP INDONESIA**

Meskipun operasi keamanan maritim RSN tidak menimbulkan ancaman secara langsung terhadap Indonesia, namun proyek reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura sejak tahun 1966 justru menimbulkan ketegangan politik antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, sempitnya wilayah perairan yang memisahkan antara Indonesia dan Singapura, sehingga batas maritim kedua negara hanya berupa batas laut territorial saja. Sejatinya, laut territorial ini memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara. Pertama, laut territorial ini dapat berfungsi sebagai wilayah pertahanan. Kedua, berguna untuk melindungi wilayah teritorialnya itu sendiri. Ketiga, laut territorial memiliki fungsi untuk melindungi kekayaan sumber daya alam laut. Keempat, berfungsi sebagai sanitasi dan karantina bagai orang-orang asing yang masuk ke dalam suatu teritori.

Sebelum adanya isu reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura, permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura ini telah muncul sejak tahun 1957, karena adanya tumpang tindih klaim lebar laut territorial yang diajukan oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, mulai pada tahun 1973, Indonesia dan Singapura mulai mengadakan pertemuan bilateral membahas isu tersebut dengan membahas batas maritim dari tiga bagian, yakni batas maritim timur, tengah dan barat. Namun dalam perundingan tersebut, kedua negara hanya sebatas membahas dan berhasil menentukan batas maritim bagian tengah saja.

Pada tahun 2002, Indonesia mulai menunjukkan kekhawatirannya terhadap kebijakan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh KBRI Singapura yang secara resmi ingin menyelesaikan batas maritim antara Indonesia-Singapura. Indonesia mulai menyadari bahwa kebijakan Singapura tersebut akan menggeser batam maritim kedua negara, baik yang sebelumnya telah ditentukan maupun yang belum ditentukan. Jika mengacu kepada hukum internasional, yakni yang diatur oleh

Konvensi Wina 1969 pasal 2, maka batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah tidak akan berubah atau mengalami pergeseran, karena perjanjian pada tahun 1973 telah bersifat final.

Batas maritim Indonesia-Singapura pada bagian timur dan barat yang sampai saat ini belum ditentukan tentu dapat menimbulkan potensi masalah di kemudian hari. Terlebih, aktivitas reklamasi pantai yang dilakukan Singapura dalam rangka memperluas wilayahnya, akan bergesernya jalur laut Singapura ke arah selatan. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura pada bagian timur dan barat ke arah selatan. Situasi ini, akan menguntungkan Singapura, karena dimungkinkan adanya perubahan titik pangkal yang menjadi dasar penentuan batas maritim Singapura. Bahkan menurut hukum internasional, pergeseran tersebut sangat besar kemungkinan terjadi, karena antara Indonesia dan Singapura belum menyelesaikan batas maritimnya. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, tidak secara spesifik membahas mengenai reklamasi pantai.

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura secara otomatis tidak hanya mengubah bentuk daratannya, namun juga menghilangkan titik-titik pangkal sebelumnya. Hilangnya titik-titik pangkal yang lama, tentu menjadi peluang besar bagi Singapura dalam menentukan titik-titik pangkal baru berdasarkan daratan yang telah dibentuk melalui reklamasi.

Restorasi pergeseran batas maritim Singapura ke arah selatan ini akan menguntungkan Singapura seiring dengan perluasan wilayah dan kedaulatan teritorialnya. Bagi Indonesia, tentunya hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kedaulatan Indonesia. Bergesernya batas maritim Singapura ke arah selatan, tentunya berbanding lurus akan memperluas wilayah udara Singapura. Sehingga, wilayah perairan dan udara Indonesia juga akan semakin terbatas.<sup>15</sup> Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan reklamasi pantai Singapura ini juga dapat mempengaruhi terhadap berkurangnya kedaulatan teritorial Indonesia.

---

<sup>15</sup> Ahmad Abraham Hasan. 2022. *Langkah Indonesia Dalam Diplomasi Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Pantai Singapura*. Yogyakarta

Berkurangnya kedaulatan teritorial Indonesia tentunya akan berdampak besar bagi seluruh aspek di dalam negeri. Pertama, Indonesia tidak lagi mempunyai hak pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kedua, peluang Indonesia dalam mendapatkan kembali titik-titik tersebut akan menjadi sulit, mengingat faktor fungsionalitas dan efektivitas. Ketiga, Indonesia akan kesulitan dalam menjalankan kedaulatannya, terutama untuk menghadapi berbagai potensi ancaman yang datang dari sisi eksternal.<sup>16</sup>

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak tahun 1962 merupakan salah bagian dari kebijakan nasional yang ditujukan bagi kepentingan nasionalnya. Bagi Singapura, reklamasi pantai ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi sempitnya wilayah daratan, mengantisipasi kelonjakan penduduk dan meningkatkan aktivitas perdagangan dan bisnisnya. Di satu sisi, kebijakan reklamasi pantai ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas Angkatan Laut Singapura dalam menghadapi berbagai potensi ancaman berdasarkan konsep keamanan maritim yang muncul dari arah laut. Reklamasi pantai ini menjadi bagian dari penyediaan dan penguatan infrastruktur keamanan Singapura di tengah-tengah keterbatasan wilayah daratan. Namun bagi Indonesia, reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura menyebabkan bergesernya batas maritim antara Indonesia-Singapura ke arah selatan yang justru akan sangat merugikan Indonesia. Kerugian yang dialami Indonesia ini tidak hanya satu dimensi saja, melainkan multidimensi, karena mempengaruhi kedaulatan teritori Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas dalam mencermati kebijakan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura. Hal ini menjadi sangat jelas bahwa kebijakan reklamasi pantai tersebut akan memberikan dampak besar bagi kedaulatan teritori Indonesia ke depannya. Penggunaan jalur diplomasi harus secara konsisten dan berkesinambungan dalam menyelesaikan isu

---

<sup>16</sup> Eka Christiningsih Tanlain. 2006. Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura. Jember

perbatasan maritim antara Indonesia dengan Singapura, untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian yang didapati oleh Indonesia di kemudian hari. Hal ini juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki *power* dalam menjaga kedaulatan negara.

### ريفيريسي

- Ahmad Abraham Hasan. 2022. Langkah Indonesia Dalam Diplomasi Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Pantai Singapura. Yogyakarta.
- Amaritasari, Indah. 2015. Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. 1 No.2 hal 153-173.
- Anggoro, Kusnanto. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.
- Ardhiwisastra, Yudah Bhakti. 1999. Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing. Alumni: Bandung.
- Bilveer Singh, *Southeast Asia-India Defence Relations in the Changing Regional Security Landscape*, IDSA Monograph Series No. 4, Mei 2011, New Delhi
- Berkowitz, Morton and Bock, P.G. 1965. American National Security. New York : Free Press.
- Bowers, I. & Koh, Swee Lean C., Singapore's Maritime Security Approach. *Grey and White Hulls: An International Analysis of the Navy-Coastguard Nexus*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019
- Buerger, Christian. 2014. "What is Maritime Security?". Published by Elsevier Ltd.
- Buzan, Barry. 1991. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post. London.
- Cheng, Kenneth. 5 Juli 2021. Singapore to reclaim land around Pedra Branca to build facilities to improve maritime safety and security. <https://www.todayonline.com/singapore/singapore-reclaim->

- land-around-pedra-branca-build-facilities-improve-search-and-rescue yang diakses pada 27 April 2022 pukul 12.10 WIB
- Denzin, N.K., & Lincolln, Y.S. (2017). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Eka Christiningsih Tanlain. 2006. *Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura*. Jember
- Harun Umar dan Melati Nasional Rambu Bangi. 2021. *Kebijakan Singapura Mempertahankan Kerjasama dengan Israel dalam Bidang Pertahanan Keamanan*.
- Klein, Natalie J. M. 2011. *Maritime Security*. In *International Law and policy Perspective from Australia and New Zealand*. Routledge.
- Lim Min Zhang. 6 Juli 2021. *Singapore, US navies conduct bilateral exercise in waters off Guam*. <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-us-navies-conduct-bilateral-exercise-in-waters-off-guam>
- Muhammad Ade Pamungkas. 14 Juli 2020. *Kekuatan Militer Singapura 2022, dari Pasukan hingga Senjata*. <https://tirto.id/kekuatan-militer-singapura-2020-dari-pasukan-hingga-senjata-fQCE>
- M. Nazarudin Latief. 21 Oktober 2019. *Singapura dan China tandatangani perjanjian pertahanan*. <https://www.aa.com.tr/id/regional/singapura-dan-china-tandatangani-perjanjian-pertahanan/1621146#>
- P.S. Suryanarayana, India, Singapore hold 'maritime exercise'.
- Winartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Gaha Ilmu
- <https://amti.csis.org/singapores-conceptualization-of-maritime-security/>
- [https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2017/june/30jun17\\_fs4!/ut/p/z0/fc0xD4IwEAXg3-LA2FxBIBlxUCO4oKldTJVDi3goraD\\_3uLk5HR5L1\\_egQQBklSnz8rqhlTt815OD9Fmnix4GGSbSe7zeJfn68ksW26jKaxA\\_gduQVePh4xBnhqy-LIgbpoKLNk3k\\_X4pbmhw17wxQVDDvXGo\\_XyqKxrMUalUFXBNyPPF49yenxcP3oUJpw-BG0aZKeQd6VvTBNZQNi0CAGDeJX36\\_y-07j0QeQwYOt/](https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2017/june/30jun17_fs4!/ut/p/z0/fc0xD4IwEAXg3-LA2FxBIBlxUCO4oKldTJVDi3goraD_3uLk5HR5L1_egQQBklSnz8rqhlTt815OD9Fmnix4GGSbSe7zeJfn68ksW26jKaxA_gduQVePh4xBnhqy-LIgbpoKLNk3k_X4pbmhw17wxQVDDvXGo_XyqKxrMUalUFXBNyPPF49yenxcP3oUJpw-BG0aZKeQd6VvTBNZQNi0CAGDeJX36_y-07j0QeQwYOt/)

إسلام نوسنتارا: أنتارا أرڇومين فوليتيس,  
سڤيربتوال, دان أيفيستيمولوكيس  
عاريف بوديمان

كيلاهيران دان فيرڇيمباغان ليسبومي: سواتو  
سنتودي هيبستوريس  
جوهان وهيوډي

فيلانسانان إباداه حاجي ماسا هينديا بيلاندا:  
تيلجانان كرڇيتيس تيرهاداف قيمكيران  
چ. سناوڇك هوڇرونجي  
ليسي مزياتي دان اندريانشاه

سنتراتيڇي كيامانان مارڇيتيم سيغافورا دان  
دامڇكبا باڇي ايندونيسيا  
فراديتو كوموجويو

إيمڇليمينتاتيان ڇاف دالام كيببجاكان  
قيمبيريان بياسيسنوا سيسنوا اوڇڇول فاقوا  
دي لوار نيڇيري  
محمد رجال اوتو

أيفيڇنتيفيتاس سنتراتيڇي ديراديكالياساسي قادا  
نارافيدانا تيروريسمي دي روتان ڇيكياس  
دبني قرويواتي